

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**



DISUSUN TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. Veteran No. 23, Sragen Tengah, Kec Sragen, Kab. Sragen
JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen TA. 2025 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026. Adapun penyusunan Perubahan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Kritik dan saran kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen.

Sragen, 16 Mei 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sragen

R. TRIYONO PUTRO, SH. M.Si
NIP. 19690317 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II PELAKSANAAN RENCANA KERJA	6
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berkenaan.	6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025	
3.1 Rumusan Rencana rogram dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah	17
BAB V PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran BPBD Tahun 2025	6
Tabel 2.2	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	12
Tabel 3.1	Kinerja dan Sasaran Program Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan adalah sebuah proses paling penting dari seluruh fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak bisa berjalan. Dengan pengertian lain, perencanaan adalah proses dasar dari manajemen untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD periode tahun 2022-2026, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Sragen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan dan sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Nomor 000.7.2.4/324/23/2025 Tentang Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, yang didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan atas Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 seperti perubahan target kinerja beberapa program dan kegiatan beserta pagu indikatifnya.

Sebagaimana penyusunan rencana pembangunan daerah pada umumnya, rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berdasarkan Rancanagan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2025, didasarkan pada peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) adalah:

- a. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen selama tahun 2025;
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran;
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun dan keselarasan program, kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD maupun Perubahan RPJMD.
- e. Menjadi acuan untuk Menyusun evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah TW I Tahun berkenaan

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berkenaan.

Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

3.1 Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI TRIWULAN I PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tri Wulan I Tahun Berkenaan

Evaluasi merupakan suatu proses penilaian terhadap pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai hasil. Hasil evaluasi dipergunakan sebagai umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai Tri Wulan I Tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, professional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Stagen Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Stagen Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran BPBD tahun 2025 :

Tabel. 2.1

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran BPBD Th. 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,63	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi, edukasi, pencegahan dan penanganan bencana	Persen	77	

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
			I					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)					0,00	17,00		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)					25,00			
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)					41,18			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.235.935.128		539.964.288		16,69
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.235.935.128		539.964.288		16,69
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100,00	2.283.011.008	0,00	441.067.288	0,00	19,32
1.05.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan Tunjangan ASN [%]	100,00	1.645.613.303	25,00	395.462.435	25,00	24,03
1.05.01.2,02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	11,00	1.645.613.303	11,00	395.462.435	100,0 0	24,03
1.05.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah [%]	100,00	241.045.500	0,00	16.910.000	0,00	7,02
1.05.01.2,06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	4.890.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.01.2,06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	25.000.000	0,00	0	0,00	0,00

1.05.01.2,06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [Paket]	1,00	7.991.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.01.2,06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	120.134.500	0,25	10.578.000	25,00	8,81
1.05.01.2,06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	1,00	8.030.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.01.2,06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	50,00	75.000.000	5,00	6.332.000	10,00	8,44
1.05.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [%]	100,00	73.824.719	0,00	9.218.143	0,00	12,49
1.05.01.2,08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	12,00	1.571.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.01.2,08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12,00	42.938.000	3,00	9.218.143	25,00	21,47
1.05.01.2,08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	9.316.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.01.2,08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	19.999.719	0,00	0	0,00	0,00
1.05.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [%]	100,00	322.527.486	0,00	19.476.710	0,00	6,04
1.05.01.2,09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	8,00	112.675.900	8,00	16.294.210	100,00	14,46
1.05.01.2,09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	15,00	34.955.000	3,00	3.182.500	20,00	9,10
1.05.01.2,09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1,00	174.896.586	0,00	0	0,00	0,00

		Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]						
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	19,32	0,00	19,32
Predikat kinerja					SR	SR	SR	SR
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- []	0,00	24.950.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.02.2,01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- []	0,00	24.950.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.02.2,01.0 006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan [Dokumen]	1,00	24.950.000	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	0,00	0,00	0,00
Predikat kinerja					SR	SR	SR	SR
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana [%]	100,00	927.974.120	0,00	98.897.000	0,00	10,66
1.05.03.2,01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	% warga desa yang mendapatkan informasi rawan bencana [%]	8,77	20.400.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,01.0 007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun [Orang]	300,00	20.400.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga masyarakat/relawan yang mendapat pelatihan pencegahan [%]	4,46	140.514.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,02.0 018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota [Orang]	500,00	10.055.500	0,00	0	0,00	0,00

1.05.03.2,02.0 020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana [Kawasan]	20,00	14.787.500	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,02.0 021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana [Orang]	40,00	15.693.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,02.0 027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun [Dokumen]	1,00	85.000.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,02.0 028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana [Kawasan]	70,00	14.978.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani [%]	97,00	751.347.620	0,00	98.897.000	0,00	13,16
1.05.03.2,03.0 002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat [Dokumen]	2,00	709.330.620	1,00	98.897.000	50,00	13,94
1.05.03.2,03.0 003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana [Orang]	20,00	23.788.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,03.0 009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	100,00	18.229.000	0,00	0	0,00	0,00

	Bencana Kabupaten/Kota	Evakuasi Korban Bencana [Orang]						
1.05.03.2,04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan pasca bencana [%]	7,02	15.712.500	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,04.004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia [Dokumen]	1,00	10.000.000	0,00	0	0,00	0,00
1.05.03.2,04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan [Kegiatan]	1,00	5.712.500	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	10,66		
Predikat kinerja					SR	SR		

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana kerja BPBD sampai triwulan I tahun 2025 telah mencapai 19,32 persen dengan realisasi keuangan mencapai 23 persen. Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran/Refocusing yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja
2. Adanya capaian kinerja yang telah tercapai dalam perubahan APBD tahun 2024 pada sub kegiatan yang mengakibatkan anggaran harus digeser pada sub kegiatan yang lainnya berdasarkan prioritas .
3. Adanya kesalahan rekening belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran;
4. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan III dan IV, sehingga target belum tercapai pada triwulan I atau II.

Berdasarkan permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan berikutnya, antara lain seperti:

1. Penyesuaian terhadap Renja PBD Kab. Sragen Tahun 2025;
2. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas;
3. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan secara efektif untuk memenuhi

target indikator sasaran serta penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur;

4.Optimasi sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja semaksimalnya dengan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW I (sd 30 Maret 2025) sebagai berikut : Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan TW I (per 30 Maret 2025) dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	
					I	
			K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)					0,00	17,00
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)					25,00	
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)					41,18	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.235.935.128		539.964.288
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.235.935.128		539.964.288
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100,00	2.283.011.008	0,00	441.067.288
1.05.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan Tunjangan ASN [%]	100,00	1.645.613.303	25,00	395.462.435
1.05.01.2,02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	11,00	1.645.613.303	11,00	395.462.435

		Tunjangan ASN [Orang/bulan]				
1.05.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah [%]	100,00	241.045.500	0,00	16.910.000
1.05.01.2,06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	4.890.000	0,00	0
1.05.01.2,06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	25.000.000	0,00	0
1.05.01.2,06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [Paket]	1,00	7.991.000	0,00	0
1.05.01.2,06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	120.134.500	0,25	10.578.000
1.05.01.2,06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	1,00	8.030.000	0,00	0
1.05.01.2,06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	50,00	75.000.000	5,00	6.332.000
1.05.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [%]	100,00	73.824.719	0,00	9.218.143
1.05.01.2,08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	12,00	1.571.000	0,00	0
1.05.01.2,08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12,00	42.938.000	3,00	9.218.143
1.05.01.2,08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	9.316.000	0,00	0
1.05.01.2,08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	19.999.719	0,00	0
1.05.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [%]	100,00	322.527.486	0,00	19.476.710
1.05.01.2,09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	8,00	112.675.900	8,00	16.294.210
1.05.01.2,09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	15,00	34.955.000	3,00	3.182.500

1.05.01.2,09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	174.896.586	0,00	0
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	19,32
Predikat kinerja					SR	SR
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- []	0,00	24.950.000	0,00	0
1.05.02.2,01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- []	0,00	24.950.000	0,00	0
1.05.02.2,01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan [Dokumen]	1,00	24.950.000	0,00	0
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	0,00
Predikat kinerja					SR	SR
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana [%]	100,00	927.974.120	0,00	98.897.000
1.05.03.2,01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	% warga desa yang mendapatkan informasi rawan bencana [%]	8,77	20.400.000	0,00	0
1.05.03.2,01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun [Orang]	300,00	20.400.000	0,00	0
1.05.03.2,02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga masyarakat/relawan yang mendapat pelatihan pencegahan [%]	4,46	140.514.000	0,00	0
1.05.03.2,02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota [Orang]	500,00	10.055.500	0,00	0

1.05.03.2,02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana [Kawasan]	20,00	14.787.500	0,00	0
1.05.03.2,02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana [Orang]	40,00	15.693.000	0,00	0
1.05.03.2,02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun [Dokumen]	1,00	85.000.000	0,00	0
1.05.03.2,02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana [Kawasan]	70,00	14.978.000	0,00	0
1.05.03.2,03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani [%]	97,00	751.347.620	0,00	98.897.000
1.05.03.2,03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat [Dokumen]	2,00	709.330.620	1,00	98.897.000
1.05.03.2,03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana [Orang]	20,00	23.788.000	0,00	0
1.05.03.2,03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana [Orang]	100,00	18.229.000	0,00	0
1.05.03.2,04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan pasca bencana [%]	7,02	15.712.500	0,00	0
1.05.03.2,04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia [Dokumen]	1,00	10.000.000	0,00	0
1.05.03.2,04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1,00	5.712.500	0,00	0

		Kabupaten/Kota yang dilegalkan [Kegiatan]				
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	10,66
Predikat kinerja					SR	SR

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW I Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP, diusulkan untuk digeser sesuai kebutuhan per sub kode rekening.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, diusulkan penambahan anggaran karena menyesuaikan kebutuhan rutin.
3. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah dibuat di Perubahan APBD 2024 dalam rangka menaikkan nilai IKD yang merupakan salah satu indicator penilaian IKD.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diusulkan untuk penambahan anggaran karena untuk memfasilitasi kendaraan operasional roda 4 yang dalam penetapan tidak terjangkau anggarannya.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ada penambahan anggaran yaitu untuk beli laptop dan PC Komputer karena ada penambahan personil P3K.

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2025 sampai dengan 30 Maret 2025 atau Triwulan I) keseluruhan anggaran murni BPBD pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. **3.235.935.128,-** Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 2) bahwa capaian fisik sebesar 19 % dari target fisik 19% sampai dengan bulan Maret 2025 , dengan capaian keuangan sebesar 19 % dari target yang direncanakan sampai dengan 30 Maret 2025 sebesar 25%,

terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan, karena durasi pelaksanaan renja perubahan hanya kurang lebih 4 bulan yaitu bulan September sampai dengan Desember 2025.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Nomor 000.7.2.4/324/23/2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 tidak lepas dari Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran APBD TA. 2025. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 3.1

Rencana Kerja Perubahan APBD Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025
3	4	8	9	10	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.235.935.128,00	3.375.431.756,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.235.935.128,00	3.375.431.756,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.235.935.128,00	3.375.431.756,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	2.283.011.008,00	2.566.219.436,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	-	100 %	0,00	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	1.645.613.303,00	1.645.613.303,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.645.613.303,00	1.907.618.331,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100 %	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bulan kelancaran kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-	100 %	241.045.500,00	241.045.500,00
Penyediaan Komponen Instalasi					
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.890.000,00	4.890.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	57.475.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.991.000,00	12.771.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	120.134.500,00	116.246.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.030.000,00	5.010.400,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	75.000.000,00	40.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase bulan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	73.824.719,00	73.824.719,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.571.000,00	131.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.938.000,00	47.938.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.316.000,00	11.506.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19.999.719,00	19.999.719,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	322.527.486,00	322.527.486,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	112.675.900,00	132.781.900,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	34.955.000,00	34.955.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	174.896.586,00	174.896.586,00

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	24.950.000,00	22.279.800,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	24.950.000,00	24.950.000,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.950.000,00	22.279.800,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	-	100 %	927.974.120,00	786.932.520,00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	% warga desa yang mendapatkan informasi rawan bencana	-	11.70 %	20.400.000,00	20.400.000,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang	300 Orang	20.400.000,00	19.400.000,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga masyarakat/relawan yang mendapatkan pelatihan pencegahan	-	14.59 %	140.514.000,00	140.514.000,00
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					

	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	10.055.500,00	7.435.900,00
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	16 Keluarga	16 Keluarga	0,00	0,00
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	20 Kawasan	20 Kawasan	14.787.500,00	4.997.500,00
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	40 Orang	40 Orang	15.693.000,00	15.693.000,00
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	2 laporan	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	0,00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan	70 Kawasan	70 Kawasan	14.978.000,00	7.554.000,00

	pencegahan dan mitigasi bencana				
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	-	85 %	751.347.620,00	751.347.620,00
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	709.330.620,00	684.072.620,00
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang	20 Orang	23.788.000,00	16.838.000,00
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	18.229.000,00	18.229.000,00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan pasca bencana	-	5.85 %	15.712.500,00	15.712.500,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					

	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.712.500,00	5.712.500,00
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
J U M L A H				3.235.935.128,00	3.375.431.756,00

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Mei 2025 (Cut Off 15 Mei 2025) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perbup Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sragen tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Daerah Sragen, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sragen seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 139.496.628 ,- atau 4,3 % dari anggaran semula murni Rp. 3.235.935.128,- menjadi anggaran perubahan Rp. 3.375.431.756,-

Sragen, 16 Mei 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sragen

R. TRIYONO PUTRO, SH. M.Si
NIP. 19690317 198903 1 005